

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

NIKE NUR AINI
NIM. C2C007091

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nike Nur Aini

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007091

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Penelitian Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 14 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.)
NIP. 19810813 200801 2

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nike Nur Aini

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007091

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Penelitian Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Juni 2011

Tim Penguji :

1. Nur Cahyonowati, SE., MSi., Akt. (.....)
2. Tri Jatmiko Wahyu P, SE., MSi., Akt. (.....)
3. Dra. Hj. Indira Januarti, SE., MSi., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, NIKE NUR AINI, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Juni 2011
Yang membuat pernyataan,

(Nike Nur Aini)
NIM. C2C007091

ABSTRACT

This research aims to analyze the Corporate Governance characteristics to the Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian public listed non financial companies. The Corporate Governance characteristics which are examined are Board of Commissioner size, Board of Commissioner Independence, Audit Committee Independence, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Foreign Ownership, Concentrated Ownership, and firm size as control variable. The extent of CSR Disclosure based on Key Success for Social Performance from Nor Hadi.

The population in this research are non financial companies in Indonesian Stock Exchange 2009. Total sample which are examined are 123 companies that selected with judgment sampling methode. Collective data with content analysis and then analyzed with multiple linear regression method.

Result of this research indicates that board of commissioner size, institutional ownership, foreign ownership, and firm size had significant effect to corporate social disclosure in Indonesia. While other variabel do not have significant effect to corporate social responsibility disclosure in Indonesia.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Board of Commissioner, Audit Committee, Ownership Structure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik *Corporate Governance* yang diuji terdiri dari ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel control. Luas pengungkapan CSR didasarkan pada *Key Success for Social Performance* yang disusun oleh Nor Hadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Total sampel yang diuji sebanyak 123 perusahaan yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data yang diperoleh dengan *content analysis* kemudian dianalisis dengan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia. Faktor lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Komisaris, Komite Audit, Struktur Kepemilikan Saham.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (QS. Ar Ra’d : II)

Jika seseorang terus maju kearah impian-impianya, dan berupaya menjalani kehidupan seperti yang dikhayalkannya, maka dia akan bertemu dengan keberhasilan pada saatnya..

(Henry David Thoreau)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta atas dukungan, nasehat serta doa dan kasih sayangnya yang tak pernah putus untukku..
2. Adik-adikku yang selalu ada dan memberi semangat serta motivasi selama ini..
3. Sahabat, Kekasih dan Saudara-saudaraku atas semangat dan nasihatnya..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahiraahibbil Alaamiin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, saran, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini..
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, MSi., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
3. Ibu Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan dan petunjuk dalam

proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. selaku dosen wali atas bimbingan yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan.
6. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu tercinta, atas segala doa, nasihat, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. *I always love you..*
8. Untuk adik-adikku, Inke Naurita Purwoto dan Puan Amara Regita yang kadang ngeselin tapi ngangenin, makasih buat semangat dan dukungan kalian selama ini.
9. Anggit Wicaksono yang selalu ada dengan semua motivasi, nasihat, dukungan serta kesabarannya selama ini.
10. Segenap Saudara dan Kerabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi hingga selesai.
11. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Patralia Adityawati, Grace Nehemia Chikita P, Siska Kusumaningrum, Sevrida Verawaty, Yurisca Sinaga, dan Ratih Widya Astuti yang telah memberikan semangat, motivasi dan kebersamaan kita selama empat tahun. Jangan pada ngilang ya..

12. Segenap rekan-rekan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNDIP, terkhusus angkatan 2007 atas dukungan dan semangat yang diberikan.
13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semarang, 14 Juni 2011

Penulis,

Nike Nur Aini

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| ABSTRAK | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| 2.1 Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1 Teori Agensi | 11 |
| 2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | 13 |
| 2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR | 13 |
| 2.2.2 Pengungkapan CSR di Indonesia | 14 |

| | | |
|-------|--|----|
| 2.3 | <i>Corporate Governance (CG)</i> | 16 |
| 2.3.1 | Pengertian dan Konsep CG | 16 |
| 2.3.2 | Struktur CG | 18 |
| 2.3.3 | Perkembangan CG di Indonesia | 19 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu | 20 |
| 2.4 | Kerangka Pemikiran | 24 |
| 2.5 | Pengembangan Hipotesis | 25 |
| 2.5.1 | Ukuran Dewan Komisaris | 25 |
| 2.5.2 | Independensi Dewan Komisaris | 26 |
| 2.5.3 | Independensi Komite Audit | 28 |
| 2.5.4 | Kepemilikan Manajerial | 29 |
| 2.5.5 | Kepemilikan Institusional | 30 |
| 2.5.6 | Kepemilikan Asing | 32 |
| 2.5.7 | Kepemilikan Terkonsentrasi | 33 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | | |
|---------|---|----|
| 3.1 | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 35 |
| 3.1.1 | Variabel Dependen | 35 |
| 3.1.2 | Variabel Independen | 35 |
| 3.1.3 | Variabel Kontrol | 37 |
| 3.2 | Populasi dan Sampel Penelitian | 38 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data | 38 |
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data | 39 |
| 3.5 | Metode Analisis Data | 39 |
| 3.5.1 | Uji Asumsi Klasik | 39 |
| 3.5.1.1 | Uji Normalitas | 39 |

| | | |
|---------|--|----|
| 3.5.1.2 | Uji Multikolinearitas | 40 |
| 3.5.1.3 | Uji Heteroskedastisitas | 41 |
| 3.5.2 | Analisi Regresi Berganda | 41 |
| 3.5.3 | Pengujian Hipotesis | 43 |
| 3.5.3.1 | Uji Pengaruh Simultan (F Test) | 43 |
| 3.5.3.2 | Uji Koefisien Determinan (R ²) | 44 |
| 3.5.3.3 | Uji Parsial (t Test) | 45 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | | |
|---------|---|----|
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian | 46 |
| 4.2 | Analisis Data | 48 |
| 4.2.1 | Statistik Deskriptif | 48 |
| 4.2.2 | Hasil Uji Asumsi Klasik | 56 |
| 4.2.2.1 | Hasil Uji Normalitas | 56 |
| 4.2.2.2 | Hasil Uji Multikolinearitas | 58 |
| 4.2.2.3 | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 59 |
| 4.2.3 | Hasil Pengujian Hipotesis | 60 |
| 4.3 | Interpretasi Hasil | 64 |
| 4.3.1 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR | 65 |
| 4.3.2 | Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR | 67 |
| 4.3.3 | Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR | 68 |
| 4.3.4 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR | 69 |
| 4.3.5 | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR | 71 |

| | | |
|----------------------|---|----|
| 4.3.6 | Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR | 72 |
| 4.3.7 | Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan CSR | 73 |
| 4.3.8 | Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR | 74 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Simpulan | 76 |
| 5.2 | Keterbatasan | 78 |
| 5.3 | Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 80 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 22 |
| Tabel 4.1 Tahapan Perolehan Sampel | 46 |
| Tabel 4.2 Distribusi Sampel berdasarkan Jenis Industri | 47 |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif | 48 |
| Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Ukuran Dewan Komisaris | 48 |
| Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Independensi Dewan Komisaris | 49 |
| Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Independensi Komite Audit | 49 |
| Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Manajerial | 49 |
| Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional | 50 |
| Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Asing | 50 |
| Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Terkonsentrasi | 51 |
| Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Pengungkapan CSR | 51 |
| Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Bidang Pengungkapan CSR | 51 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov | 58 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas | 59 |
| Tabel 4.15 Hasil Glejser | 60 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran | 24 |
| Gambar 4.1 Grafik Histogram | 57 |
| Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual | 57 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| LAMPIRAN I : Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut Nor Hadi ... | 84 |
| LAMPIRAN II : Daftar Perusahaan Sampel Penelitian | 89 |
| LAMPIRAN III : Tabulasi Data setiap Perusahaan | 93 |
| LAMPIRAN IV : Hasil Olah Data menggunakan SPSS 16.00 | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR timbul sebagai akibat dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya selain memberi banyak manfaat tetapi menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatif tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan perusahaan. Beberapa kasus seperti kasus Freeport Indonesia, kasus PT. Unocal dan kasus Lapindo Brantas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang kurang mempedulikan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan.

Praktik dan pengungkapan CSR jika dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Berdasarkan csrnetwork.org (2006), salah satu konsultan CSR terkemuka di Inggris (dikutip dari Said, et al., 2009), menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya dapat meningkatkan akses modal, memperbaiki kinerja keuangan, mengurangi biaya operasi, meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas.

Di Indonesia, praktik CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus yang terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dll. Selain itu, dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah juga mendorong praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Pasal 74 berisi tentang kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, selain untuk mendorong praktik dan pengungkapan CSR, juga untuk memenuhi tuntutan akan penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholders*-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu mengurangi aktivitas menyimpang seperti rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya (Kaihatu, 2006). Selain itu, prinsip *responsibility* dalam penerapan GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh Said, et al (2009) yang meneliti perusahaan-perusahaan di Malaysia yang telah terdaftar sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya, Said, et al mengambil delapan karakteristik *corporate governance* yaitu, ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, independensi komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, yang diuji hubungannya dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian Said, et al (2009) menunjukkan hanya dua variabel yang berhubungan dengan CSR *disclosure*, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan CSR, dimana variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran dan

Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain selain *government ownership* adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said, et al (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR.

Kepemilikan terkonsentrasi diteliti oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Hasil berbeda terlihat pada hasil penelitian Halme dan Huse (1997) serta Ghazali dan Wheatman (2006) dalam Said, et al (2009) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan yang terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan hak pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam menentukan keputusan strategi perusahaan.

Selain struktur kepemilikan di atas, terdapat pula kepemilikan oleh asing. Rustiarini (2009) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Menurut Said, et al (2009), perusahaan-menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan arus masuk modal lanjutan dari investor asing. Namun, hasil berbeda ada pada penelitian Amran dan Devi (2008), dan Said, et al (2009) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan asing dan luas pengungkapan CSR.

Karakteristik *corporate governance* yang lain adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen bertindak dengan benar. Veronica dan Sumin (2009) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, akan semakin besar pula pengungkapan CSR. Berbeda dengan Raheja (2003) dalam Said, et al (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi, serta sulitnya pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal-hal itulah yang akan menyebabkan rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan karena ketidakmampuan melaksanakan peran secara efisien.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Enam variabel bebas dari karakteristik *corporate governance* diambil dari penelitian Said, et al (2009) yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite

audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Penelitian ini tidak menggunakan variabel dualitas CEO (jabatan rangkap sebagai CEO dan *chairman* yang dipegang satu orang) karena di Indonesia menggunakan *two-tiers board system*. Sedangkan variabel kepemilikan oleh pemerintah tidak digunakan dan digantikan dengan kepemilikan institusional.

Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi (oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain) dalam sebuah perusahaan. Penelitian Khodadaddi, et al (2010) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Hal tersebut karena institusi akan memantau perkembangan investasinya pada suatu perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan pengendalian yang tinggi atas tindakan manajemen (Rustiarini, 2009).

Ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian yang menguji variabel serupa dan rendahnya kualitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain mendorong penulis untuk meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Salah satu prinsip *Corporate Governance* yaitu *responsibility*, menjadi salah satu sarana untuk mendorong perusahaan memenuhi tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditur, tetapi juga kepada masyarakat sekitar dan lingkungan sebagai pihak yang hidup berdampingan dengan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan *Corporate Governance* yang baik yang dapat meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak terlepas dari penerapan *Corporate Governance*. Pelaksanaan GCG sebagai suatu bentuk mekanisme pengawasan yang dapat mengontrol tindakan para pengelola perusahaan agar tidak bertindak menyimpang. Hal itu pada akhirnya dapat meningkatkan pengungkapan sosial yang akan dilakukan oleh perusahaan. Karakteristik *Corporate Governance* seperti dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan saham termasuk pihak yang berperan dalam pelaksanaan *Corporate Governance*. Oleh karena itu karakteristik tersebut juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji pengaruh karakteristik *Corporate Governance* terhadap pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia.

Berikut rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?

2. Apakah proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
3. Apakah proporsi Komite Audit Independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
6. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
7. Apakah Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik *Corporate Governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, antara lain:

1. Bagi calon investor dan investor. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam menilai perusahaan.
2. Bagi perusahaan. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perusahaan terkait tanggung jawab sosialnya.
3. Bagi Bapepam dan BEI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pengawasan dan penetapan kebijakan dalam bidang pasar modal.
4. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian atau bab dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran ringkas mengenai isi dari skripsi. Bab ini menguraikan antara lain latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Dan yang terakhir diuraikan juga perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran yang akan mempermudah pemahaman penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskripsi operasional yang terdapat dalam penelitian, variabel bebas dan terikat yang diuji, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, uraian mengenai beberapa pengujian seperti uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta interpretasi hasil dari pengujian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian dan hasil yang diperoleh, dan menjelaskan keterbatasan-keterbatasan dari penelitian, serta saran-saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Teori Agensi

Teori agensi digunakan untuk mempermudah memahami *Good Corporate Governance*. Dalam teori ini dijelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Eisenhardt (1989) dalam Mulia (2010) menyatakan bahwa teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu *pertama*, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); *kedua*, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); dan *ketiga*, manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Atas dasar tiga asumsi tersebut, manajer sebagai seorang manusia kemungkinan besar memiliki kecenderungan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunist*).

Adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kemungkinan *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Sesuai dengan *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson dalam Murwaningsari (2007) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* bagi para pemegang saham, akan

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. *Agent* akan memiliki lebih banyak informasi mengenai kinerja dan keadaan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan *principal* justru sebaliknya. Hal tersebut yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba. Manajer akan berusaha melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham.

Terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang dikeluarkan ditujukan untuk tiga jenis pengeluaran, yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*), biaya bonding (*bonding cost*), dan biaya kerugian residual (*residual loss*).

Corporate Governance dapat membantu mengurangi biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi yang muncul karena konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Rustiarini, 2010). Mekanisme pengawasan yang dimaksud adalah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dianggap mampu mengurangi masalah keagenan karena dengan adanya pengawasan maka perilaku oportunistik manajer

dan kecenderungan untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR

Darwin (2004) dalam Rawi dan Munawar (2010) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial terhadap operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

Dalam Draft ISO 26000 , 2007, *Guidance on Social Responsibility*, dalam Waryanto (2009) CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan harapan *stakeholders*, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Definisi CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan dari perusahaan dengan bertindak sesuai etika dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan,

keluarga mereka, dan juga masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya yang lebih luas.

Menurut Gray, et al (1987) dalam Murwaningsari (2007), ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) mencakup tiga hal, yaitu: (1) *Basic Responsibility*, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, dan memenuhi standar pekerjaan, (2) *Organizational Responsibility*, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*, dan (3) *Societal Responsibility*, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan dampak atas aktivitas operasional perusahaan. CSR diwujudkan agar terjaga keseimbangan diantara pelaku bisnis dan masyarakat sekitarnya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

2.2.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray, et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007). Pengungkapan (*disclosure*) terhadap aspek *social*, *ethical*, *environmental* dan *sustainability*

merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk menyampaikan bentuk akuntabilitasnya kepada para *stakeholders*.

Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, terutama dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain, peningkatan penjualan, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan (csrnetwork.org, 2006 dalam Said, et al., 2009).

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep- 38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan yang berisi mengenai kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut berisi uraian mengenai

keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya, serta uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan SDM (Murwaningsari, 2007).

2.3 Corporate Governance

2.3.1 Pengertian Corporate Governance

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Cadbury Committee yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengatur hubungan berbagai pihak di dalam maupun luar perusahaan (seperti pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, dan karyawan) sehingga terpelihara kepentingan dan tujuan masing-masing pihak.

Definisi yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Inti dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Pengimplementasian *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi dan kepatuhan

terhadap aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Terdapat lima prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yang disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, yaitu:

1. Kerterbukaan (*transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran (*fairness*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Independensi (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.2 Struktur *Corporate Governance*

Struktur *Corporate Governance* diperlukan agar pelaksanaan *Corporate Governance* mudah untuk dilaksanakan. Ada dua pola struktur *Corporate Governance* yang digunakan dalam mengelola perusahaan, yaitu:

1. *One Tier System*

One Tier System juga disebut sebagai sistem satu tingkat (*Single Board System*). Sistem ini digunakan oleh negara Anglo-Saxon seperti Amerika dan Inggris. Dalam sistem satu tingkat, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan *Board of Director*. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.

2. *Two Tiers System*

Two Tiers System disebut juga Sistem Dua Tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan Direksi bertugas mengelola dan

mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Belanda, Jerman, dan Indonesia.

2.3.3 Perkembangan GCG di Indonesia

Perhatian terhadap GCG yang lebih besar berawal dari terjadinya krisis besar yang melanda Asia. Di Indonesia krisis terjadi dalam jangka waktu yang lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dikutip dari Kaihatu (2006) terdapat beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditur.

Melihat kondisi di atas, pemerintah berusaha mendorong penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan. Tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu

cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

Selain itu, terdapat pula Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Surat keputusan tersebut menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Selain peraturan-peraturan di atas, organisasi-organisasi independen juga mendukung implementasi GCG di Indonesia, seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga independen tersebut, dapat mendorong penerapan GCG yang lebih baik di Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai CSR dan GCG telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya dilakukan oleh Said, et al (2009). Said, et al meneliti hubungan antara tujuh karakteristik *Corporate Governance* dan *CSR Disclosure*

pada perusahaan terdaftar di Malaysia. Tujuh karakteristik yang digunakan antara lain *board size*, *independen non-executive director*, *CEO duality*, *audit committee*, *ownership concentration*, *managerial ownership*, *foreign ownership*, dan *government shareholding*. Hasil penelitian menunjukkan hanya dua variabel yang berhubungan dengan luas pengungkapan CSR yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit, dan variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah.

Penelitian mengenai CSR di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Murwaningsari (2007) yang meneliti hubungan CG, CSR dan *Corporate Financial Performance*, dengan *variable control* berupa CEO Tenure. Tingkatan yang berbeda pada masa jabatan CEO akan mempengaruhi pengembangan kepemimpinan CEO juga kesempatan untuk mengendalikan manajemen. Shen (2003) dalam Murwaningsari (2007) menyatakan bahwa semakin lama masa jabatan CEO maka dia akan mengungkapkan lebih rendah praktik *corporate governance* karena dia akan memilih posisi yang aman dari kekuasaan yang dimilikinya.

Veronica dan Sumin (2009) meneliti tingkat pengungkapan CSR pada 20 emiten sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR. Hasilnya menunjukkan dari empat variabel tersebut, dua variabel yaitu profitabilitas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dua variabel lainnya tidak.

Penelitian lain dilakukan oleh Rawi dan Munawar (2010) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan *leverage* perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan oleh manajemen terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan oleh manajemen yang tinggi, maka lebih banyak melakukan aktivitas sosial dan lingkungan karena mereka menganggap masyarakat eksternal memperhatikan lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan oleh institusi dan *leverage* tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sitepu dan Hasan (2008) meneliti luas pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen berupa ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama-sama memiliki kemampuan mempengaruhi jumlah informasi sosial yang diungkapkan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, hal itu dapat meningkatkan luas pengungkapan sosialnya. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Metode Analisis | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|------------------|---|---|
| 1. | Said <i>et al.</i> (2009) | Regresi Berganda | Var. Independen: ukuran dewan, dualitas CEO, komite audit, independen non-executive director, kepemilikan manajerial, asing, terkonsentrasi, dan pemerintah. Var. dependen: CSR Disclosure | Kepemilikan oleh emerintah dan audit komite signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. |
| 2. | Murwaning sari (2007) | Regresi Berganda | Var. independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Var. dependen: kinerja perusahaan. Var. intervening: CSR | Kep. manajerial dan kep. institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. <i>Good Corporate Governance</i> yang diamati melalui kep. managerial dan institusional, berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). |
| 3. | Veronica dan Sumin (2009) | Regresi Berganda | Var. independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran dewan komisaris. Var. dependen: CSR Disclosure | ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure. profitabilitas dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure |

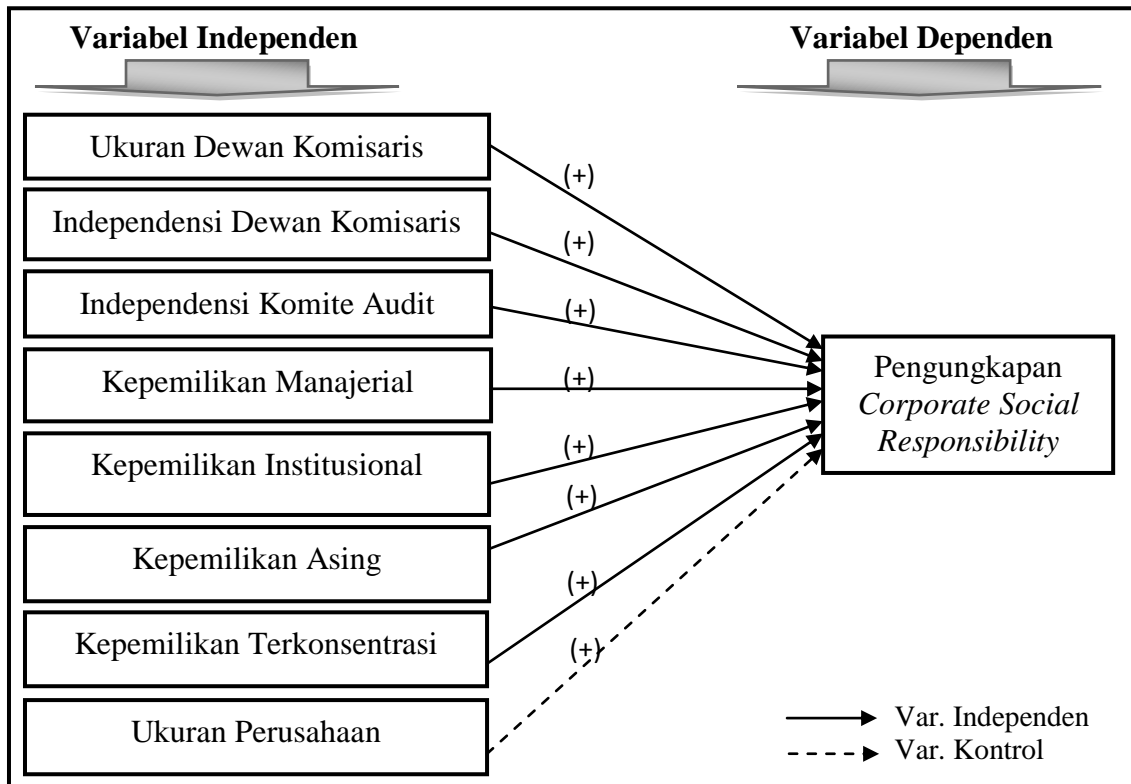
| | | | | |
|----|-------------------------|------------------|---|---|
| 4. | Rawi dan Munawar (2010) | Regresi Berganda | Var. independen: kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, <i>leverage</i> . Var. dependen: CSR | Kep. manajemen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Kep. Institusi dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR |
| 5. | Sitepu dan Hasan (2008) | Regresi Berganda | Var. independen: Ukran dewan komisaris, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas. Var. dependen: luas CSR <i>Disclosure</i> | Seluruh var. independen memiliki pengaruh terhadap jumlah informasi social yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. |

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tujuh variabel independen yang merupakan karakteristik dari *Corporate Governance* yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan terkonsentrasi. Sedangkan variabel kontrol yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu ukuran perusahaan.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan di atas, maka disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diuji. Kerangka pemikiran disusun untuk mempermudah memahami hipotesis yang dibangun di dalam penelitian.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Dewan Komisaris merupakan salah satu elemen penting bagi tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan sehingga dikelola dengan semestinya oleh agen mereka (Said, et al 2009). Di Indonesia, dewan komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris bertugas memberikan pengarahan

dan nasehat kepada direksi dan memastikan bahwa direksi telah melaksanakan GCG dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (UU No. 40 Th. 2007).

Beberapa penelitian mengenai hubungan ukuran dewan komisaris dan luas pengungkapan CSR telah banyak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Hasil penelitiannya menemukan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dan luas pengungkapan CSR di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Veronica dan Sumin (2009). Dalam penelitiannya menguji pengaruh ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela dan hasilnya menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Sembiring (2005).

Menurut Akhtaruddin, et al (2009) dalam Waryanto (2009), ukuran dewan komisaris yang lebih besar berarti lebih besar pula pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan. Jika dikaitkan dengan teori agensi, anggota dewan yang lebih besar akan memudahkan pengendalian terhadap agen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga dapat mengurangi tindakan menyimpang dari agen. Selain itu, tekanan yang lebih besar terhadap manajemen akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Semakin besar ukuran dewan komisaris, dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan sehingga dapat

menningkatkan pula luas pengungkapan perusahaan. Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.6.2 Independensi Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas dewan.

Webb (2004) dalam Said, et al (2009) meneliti perbedaan struktur dewan komisaris antara perusahaan “*socially responsible*” dengan perusahaan “*non-socially responsible*”. Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan *socially responsible*” memiliki anggota komisaris independen lebih banyak dibandingkan pada perusahaan “*non-socially responsible*”. Studi tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen memegang peran penting untuk memonitoring dan memastikan perusahaan dikelola secara benar sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan.

Penelitian oleh Forker (1992) dalam Said, et al (2009) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat mendorong Dewan Komisaris mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai pihak yang independen, mereka akan mendorong anggota dewan komisaris lain untuk melakukan tugas pengawasan lebih baik lagi. Hal tersebut dilakukan agar dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan dari tindakan agen yang menyimpang. Jika pengawasan telah dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan baik pula, dan manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk tanggung jawab sosial.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rosenstein dan Wyatt (1990) dalam Said, et al (2009) yang menyebutkan bahwa komisaris independen dapat memonitoring secara lebih baik pengelolaan perusahaan sehingga akan meningkatkan jumlah informasi yang akan dilaporkan dalam pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.6.3 Independensi Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Komite Audit merupakan komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen.

Keanggotaan komite audit sesuai dengan yang telah diatur oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia, disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Adanya anggota independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Forker, 1992 dalam Said, et al., 2009). Anggota independen dapat menjaga independensinya dari pihak manajemen, sehingga dapat secara objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen. Dengan tercapainya pengawasan yang efektif, maka dapat dipastikan pengendalian internal dilakukan dengan baik. Sehingga akan mengurangi konflik dan biaya agensi yang pada akhirnya dapat mendorong agen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan.

Penelitian Wright (1996) dalam Said, et al (2009) menemukan bahwa komposisi komite audit sangat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. McCullen dan Raghunandan (1996) dalam Said, et al (2009) mendukung temuan tersebut yang menyatakan bahwa keberadaan audit mampu menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Penelitian oleh Ho dan Wong (2001)

dalam Said, et al (2009) juga menemukan adanya hubungan positif antara independensi komite audit dan pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Proporsi Independensi dalam Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.6.4 Kepemilikan Manajerial dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan permasalahan yang akan timbul di antara prinsipal dan agen atau antara pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena kecilnya kepemilikan oleh agen di perusahaan (Said, et al 2009). Hal ini dapat menjadi penyebab tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer, dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Rawi dan Munawar (2010) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan luas pengungkapan CSR. Begitu pula dengan penelitian Murwaningsari (2009) yang menyatakan semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial maka semakin luas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak

rmanajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak yang akan merugikan perusahaan, sehingga dapat mengurangi pengawasan dan *agency cost*.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.6.5 Kepemilikan Institusional dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana dan institusi lain. Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan. Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin

mereka capai. Monitoring yang dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Adanya kepemilikan oleh institusi dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan monitoring. Investor institusional memiliki *power dan experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis berikutnya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.6.6 Kepemilikan Asing dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Kepemilikan asing salah satu karakteristik *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas. Penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said, et al (2009) menunjukkan

bahwa perusahaan-perusahaan Malaysia menggunakan laporan pengungkapan CSR sebagai salah satu strategi untuk menarik investor asing dan untuk mendapatkan arus modal lanjutan dari investor asing.

Menurut Puspitasari (2009) dalam Rustiarini (2008), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan antara lain: Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua adalah perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum.

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Rustiarini (2008) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H6: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.6.7 Kepemilikan Terkonsentrasi dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Kepemilikan terkonsentrasi berarti kepemilikan sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh suatu kelompok atau individu. Penelitian pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan pengaruh positif kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurutnya, kepemilikan yang terkonsentrasi akan mengurangi kuantitas pemegang saham di perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik antara manajemen dengan *stakeholders*. Semakin sedikit kuantitas *stakeholders* maka semakin sedikit pula variasi kepentingan yang berasal dari *stakeholders*, dengan demikian manajemen akan lebih mudah mengelola kepentingan yang lebih sedikit tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi konflik sehingga pengawasan pun akan mudah dilakukan, dan pengungkapan CSR akan semakin luas.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Said, et al (2009), yang menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H7 = Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR yang dilihat dari *annual report* perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dimana peneliti akan mengamati ada tidaknya item informasi yang diungkapkan dalam *annual report*. Item-item tersebut didasarkan pada *Key Success Factors for Social Performance* yang berisi 123 indikator pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* yang disusun oleh Nor Hadi. Jika item diungkapkan dalam *annual report* maka diberi skor “1”, namun jika item tidak diungkapkan maka diberi skor “0”.

Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSRSD} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{123 \text{ item pengungkapan}}$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian adalah jumlah seluruh anggota yang duduk dalam dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi

nasihat pada direksi. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan.

3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Variabel Independensi dewan komisaris dilihat dari proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris di perusahaan. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari rumus berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.1.2.3 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit adalah anggota yang ada di luar emiten atau perusahaan publik. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari rumus berikut:

$$\text{Independensi Komite Audit} = \frac{\text{jumlah anggota independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

3.1.2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar. Variabel ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.1.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusional seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas

dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan ini diperoleh dengan menghitung rumus di bawah ini:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.1.2.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun lembaga. Kepemilikan asing diukur berdasarkan rumus:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.1.2.7 Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan lebih dari 50% saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh satu pihak (baik perorangan atau lembaga). Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan pemberian skor “1” jika perusahaan memiliki kepemilikan terkonsentrasi, dan skor “0” jika kepemilikan perusahaan tidak terkonsentrasi.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sudah sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan CSR antara oleh Hackston dan Milne (1996), Ho dan Wong (2001), Eng dan Mak (2003), Barnea dan Rubins (2004), Gul dan Leung (2004), Mohd Nasir dan Abdullah (2004),

Haniffa dan Cooke (2005), Wilekens, et al (2005), Barako, et al (2006), Cheng dan Courtenay (2006), serta Mohd Ghazali dan Wheetman (2006). Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi untuk ukuran perusahaan.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \log (\text{total asset})$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Sampel diambil dengan metode *judgement sampling*, yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan laporan tahunan melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan.
2. perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial melalui laporan tahunannya.

Populasi berjumlah 326 perusahaan di Indonesia yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2009. Perusahaan tersebut memiliki tipe industri yang berbeda, sehingga sampel yang akan diambil harus mewakili tiap-tiap industri tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder,

berupa laporan tahunan atau *annual report* yang diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP, situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan website perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan menganalisis *annual report* perusahaan tahun 2009.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuannya untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Uji normalitas dapat dilakukan dengan

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu (Ghozali, 2009):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan alat berupa uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*, dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2009):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau $VIF \geq 10$. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika hasil uji Glejser menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikansinya di bawah 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Setelah seluruh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh, maka akan dilakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik *corporate governance* yang diproksikan dalam Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional, Kepemilikan asing, dan kepemilikan Terkonsentrasi.

2. Menghitung indeks CSR dengan cara membandingkan item-item yang diungkapkan perusahaan dalam *annual report* dengan 123 item yang diwajibkan.
3. Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan *Software SPSS Versi 16.0* untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik *corporate governance* dengan pengungkapan CSR perusahaan, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSRD} = \beta_0 + \beta_1\text{UDKOM} + \beta_2\text{KOMIND} + \beta_3\text{INDKOA} + \beta_4\text{KMENJ} + \beta_5\text{KINST} + \beta_6\text{KASG} + \beta_7\text{KKONS} + \beta_8\text{SIZE} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

CSRD : Indeks Pengungkapan CSR perusahaan

UDKOM : Ukuran Dewan Komisaris

KOMIND : Proporsi Komisaris Independen

INDKOA : Proporsi komite audit independen

KMENJ : Persentase kepemilikan manajerial

KINST : Persentase kepemilikan institusional

KASG : Persentase kepemilikan asing

KKONS : Konsentrasi kepemilikan saham

SIZE : Ukuran Perusahaan (Log total Aset)

ε_i : *error term*

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (Waryanto, 2009). Menurut Ghozali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal.
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama.
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakan uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (F test), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (t test).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini artinya keempat variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t test)

Uji parsial bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya terdapat tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.